



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

	Indikator Kinerja	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
<i>SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia</i>						
IKU 1	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)	78	82	86	90	93
IKU 2	Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)	20	40	60	80	100
<i>SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia</i>						
IKU 3	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)	30	40	50	60	70

**MANUAL PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA LEVEL KEMENTERIAN**

<i>Manual Perhitungan IKU 1</i>	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan <i>backbone</i> serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)
Target 2017	86%
Definisi	Penyediaan jaringan <i>backbone</i> serat optik nasional dipenuhi melalui program Palapa Ring. Proyek Palapa Ring bertujuan untuk mendukung jaringan telekomunikasi tetap (<i>fixed</i>) dan seluler (<i>mobile</i>), serta layanan-layanan berbasis teknologi yang digalakkan dalam program pembangunan seperti diantaranya pendidikan jarak jauh (tele-edukasi), konsultasi medis jarak jauh (tele kesehatan), pemanfaatan <i>e-government</i> , dan akses internet serta siaran TV ke berbagai pelosok nusantara. Integrasi jaringan <i>backbone</i> akan mendukung secara tidak langsung ketahanan nasional dengan meningkatnya akses informasi. Proyek dilaksanakan dalam 3 Paket untuk menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, Barat Tengah dan Timur.
Cara Menghitung	$Persentase\ Target \times Jumlah\ Kab/kota$ = 86% x 514 Kab/kota = 442 kab/kota yang harus terhubung jaringan <i>backbone</i> serat optik
Satuan	Persentase
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	Dit. Pengendalian PPI
Penanggung Jawab	BP3TI

<i>Manual Perhitungan IKU 2</i>	Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)
Target 2017	60%
Definisi	Penyediaan akses internet dalam layanan 4G LTE ke seluruh kab/kota di Indonesia.
Cara Menghitung	$Persentase\ Target \times Jumlah\ Kab/kota$ = 60% x 514 Kab/kota = 308 kab/kota yang harus terhubung dengan internet 4G LTE
Satuan	Persentase
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	Dit. Pengendalian PPI
Penanggung Jawab	Dit Penataan SDPPI, BP3TI

<i>Manual Perhitungan IKU 3</i>	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)
Target 2017	50%
Definisi	Target kinerja ini bertujuan untuk tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Merujuk pada Laporan Kinerja Kemkominfo Tahun 2016, pengukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut diukur melalui hasil survey kepercayaan publik kepada pemerintah. Hasil <i>Edelman Trust Barometer 2017</i> , survei menunjukkan bahwa 71% masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintah, hasil tersebut naik sebesar 13% dari hasil survei tahun sebelumnya (2016 = 58%). Dengan capaian indeks diatas 60%, menempatkan Indonesia di jajaran negara-negara “ <i>Trusters</i> ”. Sampel diambil dari 1.150 responden dengan usia diatas 18 tahun melalui metode jajak pendapat online/daring. Hasil tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah. Dengan semakin besarnya pengetahuan publik, maka akan makin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, tahun ini Ditjen IKP akan melaksanakan Survey publik sendiri.
Cara Menghitung	Hasil survey kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 50%
Satuan	Persentase
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Survey yang dilakukan Ditjen IKP
Penanggung Jawab	Ditjen IKP

INDIKATOR KINERJA UTAMA

ESELON I KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran	IKU Eselon I	Target 2017
SEKRETARIS JENDERAL		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika		
IKU 1	Indeks reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	A (80)
IKU 2	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika	A (80)
DITJEN SDPPI		
Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia		
IKU 3	Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk <i>mobile broadband</i>	50%
IKU 4	Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	93%
IKU 5	Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	93%
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan		
IKU 6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	82
IKU 7	Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	8,7
DITJEN PPI		
Terwujudnya pengentasan kesenjangan digital dan mempertahankan kedaulatan di wilayah 3T dan Lokpri		
IKU 8	Jumlah Kebijakan terkait infrastruktur Penyiaran dan Pita Lebar	7 naskah
IKU 9	Persentase (%) desa di wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri yang memperoleh akses telekomunikasi bergerak seluler (BTS)	5,43%
IKU 10	Jumlah akses internet di lokasi layanan publik (antara lain puskesmas, Sekolah, Balai Latihan Kerja, Pariwisata, Sentra Produktif) diprioritaskan pada wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri.	800

IKU 11	Presentase (%) Infrastruktur Pemancar Lembaga Penyiaran Publik di daerah 3T yang berfungsi dengan baik.	17,8%
IKU 12	Persentase (%) penyelesaian Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring) antara lain : i. Paket Barat ii. Paket Tengah iii. Paket Timur	80% 30% 10%
Terwujudnya peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah 3T dan Perbatasan dengan Penguatan Ekosistem		
IKU 13	Prosentase (%) desa 3T yang bebas buta internet	4%
Terwujudnya Migrasi TV dari Analog ke Digital		
IKU 14	Jumlah Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran inisiatif DPR	1 naskah
IKU 15	Prosentase (%) keberhasilan uji coba siaran TV digital	20 lokasi
Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi yang mendukung keamanan dan ketertiban		
IKU 16	Jumlah Naskah kebijakan di bidang registrasi Kartu Prabayar	1 naskah
Terwujudnya Ketaatan Penyelenggara Telekomunikasi dalam pemenuhan Penggunaan Produksi dalam Negeri		
IKU 17	Jumlah penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada frekuensi 2,1 Ghz yang dilakukan verifikasi terhadap TKDN sesuai amanat regulasi	4
DITJEN APTIKA		
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan TIK dan aplikasi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan sektor sektor strategis pemerintah		
IKU 18	Perbaikan Peringkat Indeks ICT Indonesia	Indeks ICT <100
IKU 19	Jumlah technopreneur mandiri yang tercipta	200 <i>technopreneur</i> *Penurunan target 65 <i>Technopreneur</i>
IKU 20	Jumlah nama domain .id untuk UKM, sekolah, komunitas, dan desa yang diberikan gratis dan dimanfaatkan	40.000 domain.id
IKU 21	Jumlah Sertifikat Digital	100.000 sertifikat digital
IKU 22	Jumlah UMKM <i>Go Online</i>	1.000.000 UMKM *Penurunan target menjadi 29.000 UMKM
IKU 23	Jumlah Petani dan Nelayan <i>Go Online</i>	300.000 Petani dan Nelayan
IKU 24	Jumlah Dokumen Peta ekosistem ekonomi digital	1 dokumen
IKU 25	Jumlah inisiatif roadmap <i>e-Government</i> tahap II yang terlaksana	8 inisiatif

DITJEN IKP		
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia		
IKU 26	Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%
IKU 27	Persentase (%)Konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik	100%
IKU 28	Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	70%
IKU 29	Persentase (%) Pengelolaan Kanal Informasi Pusat, Daerah dan Mitra;	60% (Dari 7 Kemitraan yang direncanakan pada Tahun 2017)
INSPEKTORAT JENDERAL		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di Kemkominfo		
IKU 30	Persentase (%) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo	80%
IKU 31	Opini atas Laporan Keuangan	WTP
BALITBANG SDM		
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan		
IKU 32	Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder	30% (dari 20 kajian penelitian)
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika		
IKU 33	Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK	70% (Dari 1.120 orang) *Ada perubahan target jadi 70% dari 760 orang
IKU 34	Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK berbasis SKKNI	70% (Dari 12.000 orang) *Ada perubahan Target menjadi 10.750 Orang
IKU 35	Jumlah rancangan regulasi SKKNI Bidang Kominfo	4 dokumen
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah		
IKU 36	Jumlah peserta literasi TIK untuk anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas	5400 *Perubahan Target Menjadi 5.300

**MANUAL PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA LEVEL ESELON I**

Manual IKU 1	Indeks reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Target 2017	A (80)
Definisi	Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Masing-masing komponen mempunyai nilai bobot. Adapun Komponen Pengungkit mencakup Area : a. Manajemen Perubahan (Bobot 5) b. Penataan Peraturan Peundang-undangan (Bobot 5) c. Penataan dan Penguatan Organisasi (Bobot 6) d. Penataan Tata Laksana (Bobot 5) e. Penataan Sistem Manajemen SDM (Bobot 15) f. Penguatan Akuntabilitas (Bobot 6) g. Penguatan Pengawasan (Bobot 12) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 6)
Cara Menghitung	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
Satuan	Indeks
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
Penanggung Jawab	Biro Kepegawaian dan Organisasi

Manual IKU 2	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
Target 2017	A (80)
Definisi	Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh Kemenpan dan RB dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atas <i>outcome</i> terhadap penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5 komponen: Perencanaan Kinerja (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%). Nilai akhir penjumlahan komponen menjadi nilai tingkat akuntabilitas instansi yang dinilai: AA (>85-100) adalah memuaskan A (>75-85) adalah sangat baik B (>65-75) adalah baik

	CC (>50-65) adalah Cukup (memadai) C (>30-50) adalah kurang D (0-30) adalah sangat kurang
Cara Menghitung	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
Satuan	Indeks
Klasifikasi	Maximize
Sumber Data	Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
Penanggung Jawab	Biro Perencanaan

Manual IKU 3	Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk <i>mobile broadband</i>
Target 2017	50%
Definisi	Peningkatan jumlah trafik yang signifikan sehingga perlu diantisipasi dengan peningkatan kapasitas sistem jaringan, terutama bagi jaringan nirkabel. Salah satu upaya untuk menjawab ini adalah dengan adanya kebutuhan penambahan Bandwidth sebesar 350 MHz hingga tahun 2019 yang perlu disediakan oleh Ditjen SDPPI untuk dimanfaatkan sebagai mobile broadband. Rencana ini pula telah terdapat pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019. Kebutuhan ini sangat krusial untuk menghindari terjadinya <i>congestion</i> (kemacetan) jaringan dimasa depan. Tambahan spektrum untuk <i>mobile broadband</i> diupayakan melalui kegiatan seleksi pita frekuensi dengan target 50% dari 350MHz.
Cara Menghitung	$\frac{\text{Akumulasi SFR}}{\Delta\text{SFR}} \times 100\%$ <p>Dimana, Akumulasi SFR : akumulasi capaian tambahan spektrum frekuensi radio s.d th eksisting ΔSFR : target tambahan spektrum frekuensi radio tahun 2019</p> <p>Maka Target 2017 = 50% x 350 Mhz = 175 Mhz</p>
Satuan	Mhz
Klasifikasi	Stabilize
Sumber Data	Dit. Penataan SDPPI
Penanggung Jawab	Dit. Penataan SDPPI

Manual IKU 4	Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio
Target 2017	93%
Definisi	Untuk melindungi pengguna frekuensi radio yang legal, Direktorat Pengendalian SDPPI berkewajiban memberikan pelayanan penanganan gangguan penggunaan frekuensi radio dan penertiban pengguna yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disisi lain pelanggaran penggunaan frekuensi pada umumnya berbanding lurus dengan pelanggaran spesifikasi perangkat yang digunakan, oleh karenanya perlu dilakukan monitoring dan penertiban sertifikasi perangkat pos dan informatika. Dengan terlaksananya Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta Standar Perangkat telekomunikasi secara optimal akan berdampak pada tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang pada ujungnya menjamin terjaganya kelancaran dalam bertelekomunikasi serta memperkecil resiko timbulnya kerugian/gangguan di pihak internal atau eksternal.
Cara Menghitung	$\frac{\sum SFR\ selesai}{\sum SFR\ monitor} \times 100\%$ <p>Dimana, $\sum SFR\ selesai$ = jumlah penanganan aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang sudah terselesaikan $\sum SFR\ minitor$ = jumlah aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang termonitor</p>
Satuan	persentase
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Dit. Pengendalian SDPPI
Penanggung Jawab	Dit. Pengendalian SDPPI

Manual IKU 5	Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika
Target 2017	93%
Definisi	Untuk melindungi pengguna frekuensi radio yang legal, Direktorat Pengendalian SDPPI berkewajiban memberikan pelayanan penanganan gangguan penggunaan frekuensi radio dan penertiban pengguna yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disisi lain pelanggaran penggunaan frekuensi pada umumnya berbanding lurus dengan pelanggaran spesifikasi perangkat yang digunakan, oleh karenanya perlu dilakukan monitoring dan penertiban sertifikasi perangkat pos dan informatika. Dengan terlaksananya Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta Standar Perangkat telekomunikasi secara optimal akan berdampak pada tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang pada ujungnya menjamin terjaganya kelancaran dalam bertelekomunikasi serta memperkecil resiko timbulnya kerugian/gangguan di pihak internal atau eksternal.
Cara Menghitung	<p>Metode Pengukuran Persentase untuk Capaian Kinerja perbulan berdasarkan atas pemenuhan Target Kinerja perbulan</p> <p>Untuk pengukuran Target Persentase dalam 1 Tahun didasarkan atas :</p> $\% \text{ Penegakan Hukum} = \frac{JTL}{(JPTEL - JPB)}$

	Dimana: JTL = Jumlah hasil Tindak lanjut pelanggaran JPTEL = Jumlah Perangkat Telekomunikasi yang Termonitor JPB = Jumlah Perangkat Bersertifikat
Satuan	persentase
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	Dit. Pengendalian SDPPI
Penanggung Jawab	Dit. Pengendalian SDPPI

Manual IKU 6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
Target 2017	82
Definisi	Survey mengukur kepuasan masyarakat untuk 4 jenis layanan publik yg diselenggarakan SDPPI yaitu: ISR utk layanan Dinas Tetap Bergerak Darat, ISR utk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat, sertifikasi operator radio dan pengujian perangkat yang diuji tepat waktu.
Cara Menghitung	Berdasarkan hasil Survey yang dilaksanakan oleh Pihak III/Konsultan Independen.
Satuan	Indeks
Klasifikasi	Maximize
Sumber Data	Setditjen SDPPI
Penanggung Jawab	Setditjen SDPPI

Manual IKU 7	Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
Target 2017	8,7
Definisi	Indeks integritas pelayanan publik diperoleh dari kombinasi antara variabel pengalaman integritas (terdiri dari indikator & sub-indikator yg terkait dgn pengalaman tindak pidana korupsi, pemberian gratifikasi) dan potensi integritas (terdiri dari indikator yang memiliki potensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi)
Cara Menghitung	Berdasarkan hasil Survey yang dilaksanakan oleh Pihak III/Konsultan Independen.
Satuan	indeks
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Setditjen SDPPI
Penanggung Jawab	Setditjen SDPPI

Manual IKU 8	Jumlah Kebijakan terkait infrastruktur Penyiaran dan Pita Lebar
Target 2017	7 naskah
Definisi	7 Naskah tersebut adalah penyelesaian total Jumlah dokumen dukungan kebijakan yang antara lain termasuk, namun tidak terbatas : 1. MOU/PKS dalam penyediaan Infrastruktur Penyiaran dan Pita lebar; 2. Hasil evaluasi penyediaan infrastruktur penyiaran dan Pita lebar 3. Pedoman Pemanfaatan Jaringan Back Bone Palapa Ring 4. Draft Revisi Permen terkait Layanan Kewajiban Pelayanan Universal 5. Draft Perpres terkait Nomor Layanan Panggilan Tunggal Darurat (112) 6. Dokumen Proses pengintegrasian Institusi dengan sistem diseminasi Informasi bencana 7. Dokumen lokasi hasil evaluasi usulan K/L/D penyediaan telekomunikasi
Cara Menghitung	Penyelesaian 7 naskah
Satuan	naskah
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	Dit. Pengembangan Pita Lebar
Penanggung Jawab	Dit. Pengembangan Pita Lebar

Manual IKU 9	Persentase (%) desa di wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri yang memperoleh akses telekomunikasi bergerak seluler (BTS)
Target 2017	5,43%
Definisi	Pelaksanaan penyediaan BTS di daerah perbatasan yang merupakan amanat dari Nawacita, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi. Saat ini berdasarkan data yang diterima Ditjen PPI dari Pemerintah Daerah pada tahun 2015 terdapat lebih dari 124 Kecamatan khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis bagi suatu Negara dalam mendukung keberhasilan pembangunan, hal tersebut dikarenakan kawasan perbatasan merupakan representative nilai kedaulatan suatu Negara, bermula dari kawasan perbatasan akan mendorong perkembangan ekonomi, sosial budaya dan kegiatan masyarakat lainnya yang akan saling mempengaruhi antara Negara, sehingga berdampak pada strategi kemandirian dan pertahanan Negara. Kawasan perbatasan suatu Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah Negara. Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo c.q BP3TI hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan perluasan infrastruktur pembangunan BTS khususnya di daerah yang belum terjangkau oleh operator telekomunikasi.
Cara Menghitung	Mengalikan 5,43% dengan Jumlah Total Desa Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri Tanpa Sinyal (5.520 desa) $= 5,43\% \times 5.520 \text{ Desa}$ $= 300 \text{ Desa}$

	Sehingga 300 desa di wilayah Desa tertinggal dan Perbatasan Lokpri harus terbangun dalam tahun 2017.
Satuan	Persentase
Klasifikasi	Stabilize
Sumber Data	BP3TI
Penanggung Jawab	BP3TI

Manual IKU 10	Jumlah akses internet di lokasi layanan publik (antara lain puskesmas, Sekolah, Balai Latihan Kerja, Pariwisata, Sentra Produktif) diprioritaskan pada wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri.
Target 2017	800
Definisi	Pelaksanaan Sewa Jasa Akses Internet merupakan amanat dari Nawacita, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi. Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo c.q BP3TI hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan pembangunan broadband akses khususnya di daerah yang belum terjangkau. Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemkominfo melakukan kerjasama dengan prinsip sinergitas dan partisipasi secara bottom up yang merupakan usulan dari Pemda/Kementerian/Lembaga/Instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelayanan Universal. Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen PPI- BPPPTI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. menyediakan Jasa Akses Internet (BPPPTI) b. melakukan evaluasi Sewa Jasa akses Internet (Ditjen PPI)
Cara Menghitung	Nilai 800 merupakan perhitungan 14,5% dikali Jumlah Total Desa Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri Tanpa Sinyal (5.520 Desa) yang dijadikan target pembangunan tahun 2017. Sehingga 800 desa di wilayah Desa tertinggal dan Perbatasan Lokpri harus terbangun akses internet pada tahun 2017.
Satuan	desa
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	BP3TI
Penanggung Jawab	BP3TI

Manual IKU 11	Presentase (%) Infrastruktur Pemancar Lembaga Penyiaran Publik di daerah 3T yang berfungsi dengan baik.
Target 2017	17,8%
Definisi	Sebagian besar perangkat di stasiun LPP-TVRI telah dalam kondisi tidak layak untuk beroperasi, proyek ini mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas sinyal dan cakupan siaran TV. Proyek ini akan merehabilitasi kemampuan jaringan transmisi dengan mengganti jaringan transmisi yang telah berusia lebih dari 25 tahun, untuk membuat cakupan dan kualitas jaringan transmisi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Hal ini membantu

	pemerintah Indonesia dalam melayani kewajiban pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Masyarakat, terutama di daerah terpencil, akan memiliki lebih banyak akses terhadap informasi, diperkaya dan diberdayakan dengan informasi dan pengetahuan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Cara Menghitung	17,8% x 112 lokasi = 19,9 lokasi dengan pembulatan menjadi 20 Lokasi
Satuan	lokasi
Klasifikasi	<i>stabilize</i>
Sumber Data	Dit. Pengembangan Pita Lebar
Penanggung Jawab	Dit. Pengembangan Pita Lebar

Manual IKU 12	Persentase (%) penyelesaian Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring) antara lain : i. Paket Barat, ii. Paket Tengah, iii. Paket Timur
Target 2017	Barat 80% Tengah 30% Timur 10%
Definisi	Proyek Palapa Ring adalah proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (<i>broadband</i>) di Indonesia. Proyek Palapa Ring merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ruang lingkup Proyek Palapa Ring adalah sebagai berikut: Dibangun di 57 kab/kota yang terbagi dalam tiga paket yaitu Barat, Tengah, dan Timur.
Cara Menghitung	Nilai : 80% untuk paket barat adalah diukur berdasarkan jumlah IKK (5 IKK) pada wilayah paket barat yang tercover oleh jaringan Palapa ring Nilai : 30% untuk paket barat adalah diukur berdasarkan jumlah IKK (17 IKK) pada wilayah paket Tengah yang tercover oleh jaringan Palapa ring Nilai : 10% untuk paket barat adalah diukur berdasarkan jumlah IKK (35 IKK) pada wilayah paket Timur yang tercover oleh jaringan Palapa ring
Satuan	Persentase
Klasifikasi	Stabilize
Sumber Data	Dit Pengendalian PPI, BP3TI
Penanggung Jawab	BP3TI

Manual IKU 13	Prosentase (%) desa 3T yang bebas buta internet
Target 2017	4%
Definisi	Desa Broadband Terpadu, yaitu Desa pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika yang disediakan akses internet dengan Kecepatan Minimal 2 Mbps, Aplikasi pendukung dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dalam pelaksanaannya melibatkan elemen masyarakat, K/L, Pemda dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi.

	<p>Maksud Program Desa Broadband Terpadu bermaksud memberikan dukungan kepada desa-desa yang termasuk pada lokasi prioritas berupa akses internet, perangkat akhir pengguna, aplikasi pendukung dan pendampingan.</p> <p>Tujuan Program Desa <i>Broadband</i> Terpadu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan produktivitas mata pencaharian mayoritas masyarakat pada daerah pesisir, pertanian, dan pedalaman melalui pemanfaatan TIK Mengoptimalkan harga jual hasil produksi masyarakat melalui pemanfaatan TIK Mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat pada bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan komunikasi melalui pemanfaatan TIK
Cara Menghitung	Nilai 4% diukur berdasarkan jumlah Total desa 3T dikalikan 4% atau $5.520 \times 4\% = 220$
Satuan	Persentase
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	Dit. Pengendalian PPI, BP3TI
Penanggung Jawab	BP3TI

Manual IKU 14	Jumlah Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran inisiatif DPR
Target 2017	1 naskah
Definisi	Dalam rangka implementasi televisi digital di Indonesia, diperlukan payung hukum serta tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan digital di Indonesia.
Cara Menghitung	Penyelesaian satu draft Rancangan UU Penyiaran versi Pemerintah
Satuan	Naskah
Klasifikasi	Stabilize
Sumber Data	Dit. Penyiaran
Penanggung Jawab	Dit Penyiaran, Setditjen PPI, Biro Hukum

Manual IKU 15	Prosentase (%) keberhasilan uji Coba siaran TV digital
Target 2017	20 lokasi
Definisi	<p>Kegiatan Layanan Digitalisasi Penyiaran, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Penyelenggaraan Televisi Digital eksisting (multiplexing dan penyelenggara konten) Merupakan kegiatan evaluasi/penilaian terhadap penyelenggara multiplexing dan penyelenggara konten. Penyempurnaan model bisnis TV Digital; Merupakan kajian yang dilakukan untuk menentukan model bisnis TV Digital, dimana saat ini terdapat 2 opsi model bisnis, yaitu: <i>Single Mux</i> dan <i>Multi Mux</i>.

	<p>3) Ujicoba penyelenggaraan TV Digital Merupakan kegiatan uji coba penyelenggaraan TV Digital terhadap dua opsi model bisnis TV Digital.</p> <p>4) Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi Televisi Digital</p>
Cara Menghitung	Nilai 20 adalah berdasarkan Lokasi Eksisting Mux yang ada saat ini dimana akan dilakukan Uji Coba
Satuan	Lokasi
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	Dit. Penyiaran
Penanggung Jawab	Dit. Penyiaran

Manual IKU 16	Jumlah Naskah kebijakan di bidang registrasi Kartu Prabayar
Target 2017	1 naskah
Definisi	Dalam rangka membantu mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi (misalnya: SMS spam), khususnya jasa telekomunikasi yang menggunakan kartu perdana pra bayar, Kementerian Kominfo melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memandang perlu untuk menegakkan ketentuan registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar. Dengan penerapan secara benar registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar ini, maka pengirim SMS spam dapat ditelusuri dan diketahui identitasnya sehingga nantinya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cara Menghitung	Diukur berdasarkan penyelesaian draft kebijakan/Permen Kominfo tentang registrasi kartu prabayar
Satuan	Naskah
Klasifikasi	Stabilize
Sumber Data	Dit. Pengendalian PPI
Penanggung Jawab	Dit. Pengendalian PPI

Manual IKU 17	Jumlah penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada frekuensi 2,1 Ghz yang dilakukan verifikasi terhadap TKDN sesuai amanat regulasi
Target 2017	4
Definisi	Kewajiban Penyelenggara telekomunikasi terhadap pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri Sebagaimana diamanatkan dalam permenkominfo nomor : 14 Tahun 2010.
Cara Menghitung	Nilai 4 diukur berdasarkan target jumlah operator 2,1 Ghz yang dilakukan verifikasi
Satuan	Operator terverifikasi

Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	Dit. Pengendalian PPI
Penanggung Jawab	Dit. Pengendalian PPI

Manual IKU 18	Perbaiki Peringkat Indeks ICT Indonesia
Target 2017	Indeks ICT Indonesia <100
Definisi	Dalam pemeringkatan ICT indeks, terdapat 5 kuesioner yang selama ini diberikan ITU, dua diisi oleh BPS dan tiga diisi oleh Kominfo. Kuesioner yang diisi BPS adalah <i>Household Short Questionnaire</i> (deadline 26 Maret) dan <i>Household Long Questionnaire</i> (deadline 3 September); sementara yang diisi oleh Kominfo adalah <i>World Telecommunication/ ICT Indicators Short Questionnaire</i> (deadline 2 April), <i>World Telecommunication/ ICT Indicators Long Questionnaire</i> (deadline 17 September) dan <i>ICT Price Basket Questionnaire</i> (27 October).
Cara Menghitung	Indeks dan pemeringkatan dikeluarkan oleh ITU, apabila peringkat menjadi dibawah 100, berarti mencapai target
Satuan	Peringkat
Klasifikasi	minimize
Sumber Data	ITU
Penanggung Jawab	Setdijen APTIKA

Manual IKU 19	Jumlah <i>technopreneur</i> mandiri yang tercipta
Target 2017	200 <i>technopreneur</i> *Penurunan Target menjadi 65 <i>technopreneur</i>
Definisi	Dalam mewujudkan Target Indonesia <i>Go Digital 2020</i> , salah satu langkah yang ditempuh adalah menstimulasi pertumbuhan <i>technopreneur</i> lokal melalui Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital. Gerakan ini dilaksanakan untuk mendorong penciptaan <i>technopreneur</i> yang berdaya saing global, memiliki visi kuat dan eksekusi yang matang. Gerakan 1000 startup ini memiliki tahapan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ignition</i> (penanaman pola pikir <i>entrepreneurship</i>); 2. <i>Workshop</i> (pembekalan keahlian dasar yang dibutuhkan dalam membuat startup digital); 3. <i>Hackathon</i> (pembentukan tim yang saling melengkapi keterampilan untuk membuat prototype produk); 4. <i>Bootcamp</i> (pembinaan mendalam bersama mentor untuk menyiapkan peluncuran produk); dan 5. <i>Incubation</i> (pembinaan lanjutan sampai akhirnya siap jadi bagian dari ekosistem startup digital).
Cara Menghitung	1 satuan <i>technopreneur</i> dihitung dari per 1 Tim yang telah mengikuti tahapan <i>ignition, hackaton</i> , hingga lolos ke inkubasi
Satuan	<i>Technopreneur</i>

Klasifikasi	Maximize
Sumber Data	Dit Pemberdayaan Informatika
Penanggung Jawab	Dit Pemberdayaan Informatika

Manual IKU 20	Jumlah nama domain .id untuk UKM, sekolah, komunitas, dan desa yang diberikan gratis dan dimanfaatkan
Target 2017	40.000 domain.id *Penurunan Target menjadi 20.000
Definisi	Tujuan dari program Satu Juta Domain .id “Indonesia Go Online” ini adalah untuk menuju masyarakat informasi Indonesia dengan mendorong masyarakat untuk memproduksi konten-konten positif di dunia maya. Selain itu untuk meningkatkan transaksi e-commerce di Indonesia dengan menggunakan domain .id dalam mempromosikan produknya yang merupakan bagian dari implementasi <i>Roadmap e-Commerce</i> Indonesia serta mendorong optimalisasi penggunaan hosting/data center dalam negeri.
Cara Menghitung	Jumlah domain yang aktif
Satuan	domain
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Dit Pemberdayaan Informatika
Penanggung Jawab	Dit Pemberdayaan Informatika

Manual IKU 21	Jumlah Sertifikat Digital
Target 2017	100.000 sertifikat digital
Definisi	Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional (SiVION) adalah pembangunan infrastruktur Tanda Tangan Digital Nasional yang terpercaya (<i>trusted</i>) untuk melindungi Ekonomi Digital Nasional. SiVION merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan UU ITE Pasal 11 tentang Tanda Tangan Elektronik Memiliki Kekuatan dan Kekuatan Hukum yang Sah Selama Memenuhi Syarat, serta mewujudkan amanat PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 41 dan 59 tentang Kewajiban Penggunaan Sertifikat Elektronik bagi Seluruh Layanan Publik.
Cara Menghitung	Aktivasi Sertifikat digital
Satuan	Sertifikat digital
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Dit. Keamanan Informasi
Penanggung Jawab	Dit. Keamanan Informasi

Manual IKU 22	Jumlah UMKM <i>Go Online</i>
Target 2017	1.000.000 UMKM * Penurunan target menjadi 29.000 UMKM
Definisi	Program ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM potensial menjadi pelaku bisnis online. Penggunaan platform digital dalam pelaksanaan bisnis UMKM akan mampu mendorong peningkatan penghasilan, dan berdampak positif pada perekonomian secara agregat.
Cara Menghitung	Jumlah 1 satuan UMKM yang dihitung adalah UMKM yang tereduksi (mengikuti program melalui workshop atau sosialisasi)
Satuan	UMKM
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Dit. Pemberdayaan Informatika, Dit. Pemberdayaan Industri Informatika
Penanggung Jawab	Dit. Pemberdayaan Informatika, Dit. Pemberdayaan Industri Informatika

Manual IKU 23	Jumlah Petani dan Nelayan <i>Go Online</i>
Target 2017	300.000 Petani dan Nelayan
Definisi	Program ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan memfasilitasi pemanfaatan aplikasi yang tepat untuk menunjang pengusahaan petani dan nelayan serta kinerja sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, melakukan pendampingan edukasi kepada petani dan nelayan untuk menambah wawasan mengenai pemanfaatan TIK. Sasaran program ini adalah program ini adalah petani dan nelayan go online (mendapatkan akses dan memiliki literasi TIK yang memadai agar dapat menggunakan aplikasi <i>mobile</i>) melalui <i>rollout</i> dan <i>pilot project</i> untuk aplikasi yang telah tersedia, pendampingan edukasi langsung terhadap 3.600 petani dan nelayan di tahun 2017.
Cara Menghitung	Jumlah petani dan nelayan yang tereduksi
Satuan	Petani/nelayan
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Dit. Pemberdayaan Informatika, Dit. Pemberdayaan Industri Informatika
Penanggung Jawab	Dit. Pemberdayaan Informatika, Dit. Pemberdayaan Industri Informatika

Manual IKU 24	Jumlah Dokumen Peta ekosistem ekonomi digital
Target 2017	1 dokumen
Definisi	Kementerian Kominfo dalam mendorong kemajuan digitalisasi di Indonesia telah mengidentifikasi untuk cakupan menjadi 7 sektor strategis yakni : pertanian, pendidikan, jasa keuangan, kesehatan, UKM, transportasi (darat dan laut), pariwisata, perikanan/nelayan, dan TIK (software, Internet of Things (IoT), dan games. Dengan menggunakan jasa konsultasi, Peta ekosistem digital bertujuan : a. Memetakan penyedia platform digital tiap sektor dan ekosistem pendukung b. Mengembangkan peta jalan yang menunjukkan langkah-langkah bagi Kominfo dan kementerian yang membidangi sektor untuk melaksanakan inisiatif antara sekarang dan akhir tahun 2019. c. Mengidentifikasi <i>quick wins</i> yang dapat diimplementasikan pada akhir tahun 2017
Cara Menghitung	Terselesaikan dokumen peta ekosistem ekonomi digital
Satuan	Dokumen
Klasifikasi	Stabilize
Sumber Data	Jasa Konsultan
Penanggung Jawab	Dit. Pemberdayaan Industri Informatika

Manual IKU 25	Jumlah inisiatif roadmap <i>e-Government</i> tahap II yang terlaksana
Target 2017	8 inisiatif
Definisi	Peta jalan <i>e-Government</i> telah dimulai pada tahun 2016, dan telah ditetapkan inisiatif program yang dilakukan pada setiap tahunnya dengan melibatkan instansi terkait selaku leading sector dari inisiatif tersebut dan didukung oleh kebijakan dasar untuk pelaksanaannya. Kementerian Kominfo memiliki dua peran, yaitu sebagai <i>leading sector</i> untuk inisiatif yang menjadi tugas dan fungsinya serta sebagai fasilitator untuk inisiatif yang dijalankan oleh instansi lain.
Cara Menghitung	Dalam Roadmap <i>e-Government</i> tahap II, yaitu: Dari 8 Inisiatif terdapat 4 yang dijalankan yakni PNS Data mangement, <i>E-Office</i> , Integrasi Sistem Ekspor Impor, dan Sistem Adminduk
Satuan	inisiatif
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	Dit. E-Government
Penanggung Jawab	Dit. E-Government

Manual IKU 26	Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah
----------------------	---

Target 2017	70%
Definisi	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah
Cara Menghitung	Survey Persepsi yang dilaksanakan kepada masyarakat penerima informasi publik, di lakukan di Aplikasi <i>Dashboard</i> Sistem Komunikasi Pemerintah (Memonitor aktivitas penyebaran narasi tunggal oleh K/L)
Satuan	persentase
Klasifikasi	Maximize
Sumber Data	Dit.PPI
Penanggung Jawab	Dit.PPI

Manual IKU 27	Persentase (%) Konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik
Target 2017	100%
Definisi	Konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik
Cara Menghitung	Menghitung prosentase konten yang dihasilkan oleh K/L sudah sesuai dengan standar konten yang telah disusun melalui survey & monev
Satuan	persentase
Klasifikasi	Maximize
Sumber Data	Dit.PPI
Penanggung Jawab	Dit.PPI

Manual IKU 28	Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat
Target 2017	70%
Definisi	Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, yang disampaikan secara cepat dan tepat melalui berbagai kanal <i>above the line, through the line, below the line</i>
Cara Menghitung	Menghitung pelaksanaan diseminasi informasi publik di K/L sudah sesuai dengan SOP GPR melalui survey & monev
Satuan	persentase
Klasifikasi	Maximize
Sumber Data	Dit.KP
Penanggung Jawab	Dit.KP

Manual IKU 29	Persentase (%) Pengelolaan Kanal Informasi Pusat, Daerah dan Mitra
Target 2017	60% (Dari 7 Kemitraan yang direncanakan pada Tahun 2017)
Definisi	Kerjasama pengelolaan kanal informasi dengan <i>stakeholder</i> potensial dalam rangka percepatan dan extensifikasi penyebaran konten informasi tentang program pemerintah
Cara Menghitung	60% dari 7 kemitraan kanal yang telah ditentukan (<i>Blogger, vlogger, Line, Twitter, Facebook</i> , channel manager K/L dan pemda, dan KIM) terlaksana.
Satuan	persentase
Klasifikasi	Maximize
Sumber Data	Dit. Kemitraan Komunikasi
Penanggung Jawab	Dit. Kemitraan Komunikasi

Manual IKU 30	Persentase (%) menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan eksternal dan internal
Target 2017	20%
Definisi	Mohon diisi
Cara Menghitung	Perbandingan jumlah temuan yang ada dalam periode Semester I 2017 dibandingkan dengan jumlah temuan tahun 2016 mengalami penurunan 20%
Satuan	persentase
Klasifikasi	minimize
Sumber Data	Itjen
Penanggung Jawab	Itjen

Manual IKU 31	Opini atas Laporan Keuangan
Target 2017	WTP
Definisi	Status Opini atas Laporan Keuangan hanya dikeluarkan oleh BPK yang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalam setahun. Yang dilakukan oleh APIP dalam rangka menuju opini WTP adalah melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan internal berupa: Audit, Reviu, Monitoring, dan Evaluasi serta Konsultansi. Fokus kegiatan pengawasan adalah pada bidang-bidang yang sangat potensial dapat mempengaruhi Kinerja dan Opini, ataupun potensial menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan lebih diarahkan pada kegiatan pengawasan yang bersifat preventif (seperti <i>probit audit</i>) dan pendampingan/konsultansi.

Cara Menghitung	Opini atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK
Satuan	WTP
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	BPK
Penanggung Jawab	Itjen

Manual IKU 32	Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>
Target 2017	30% (dari 20 kajian penelitian)
Definisi	<p>Penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang SDM adalah penelitian kebijakan, sehingga diharapkan hasil-hasil penelitian Badan Litbang SDM dapat dimanfaatkan oleh <i>Stakeholder</i> sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan. Target pada tahun 2017 adalah sebesar 30% dari hasil penelitian dapat dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i>.</p> <p>Metode pengukuran untuk melihat tingkat keberhasilan pencapaian sasaran program ini adalah dengan mengirimkan hasil penelitian disertai dengan lembar evaluasi (kuisisioner) kepada <i>Stakeholder</i> terkait. Berdasarkan lembar evaluasi (kuisisioner) tersebut, Badan Litbang SDM akan menerima <i>feedback</i> apakah penelitian yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i> untuk mengeluarkan kebijakan.</p> <p>Sedangkan tahapan untuk melakukan pengukuran terhadap progres sebuah penelitian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Teknis (10%) 2. Penyusunan Desain Penelitian (15%) 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data (50%) 4. Laporan Akhir Penyusunan (25%)
Cara Menghitung	30% dari 20 kajian penelitian ditindaklanjuti menjadi kebijakan
Satuan	Kajian penelitian
Klasifikasi	Maximize
Sumber Data	Balitbang SDM
Penanggung Jawab	Balitbang SDM

Manual IKU 33	Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK
Target 2017	70% (Dari 1.120 orang) *Ada perubahan target jadi 70% dari 760 orang
Definisi	Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi aparatur merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan instansi, hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan strategi nasional dalam pengembangan e-Government. Dalam sektor TIK, seiring dengan perkembangan TIK dan regulasi bidang TIK, maka diperlukan sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK bagi aparatur.

	Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari pengembangan SDM aparatur dimana diperlukan penyelenggaraan yang komprehensif dan integral di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat.
Cara Menghitung	Membandingkan antara jumlah peserta dengan peserta kompeten (lulus sertifikasi) Target 70% x 760 orang = 532 orang
Satuan	persentase
Klasifikasi	Maximize
Sumber Data	Balitbang SDM
Penanggung Jawab	Balitbang SDM

Manual IKU 34	Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK berbasis SKKNI
Target 2017	70% (Dari 12.000 orang) *Ada perubahan Target menjadi 10.750 Orang
Definisi	<p>Pengembangan SDM Nasional bidang komunikasi dan informatika (kominfo) dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa sudah dilakukan semenjak awal Kementerian Komunikasi dan Informatika didirikan Tahun 2005. Dasar kegiatan tersebut diantaranya dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 14 yang menyatakan tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan lembaga sertifikasi profesi dalam sistem pelatihan kerja nasional. Berdasarkan PP tersebut pula, Kemkominfo sebagai instansi pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional bidang kominfo melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kominfo pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra, dimana SKKNI nantinya akan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).</p> <p>Sejalan dengan fokus pemerintah pada pendidikan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja terampil siap pakai, Kementerian Kominfo melakukan intensifikasi pelatihan dan sertifikasi bidang komunikasi dan informatika berbasis SKKNI terutama bagi angkatan kerja muda, yaitu lulusan sekolah menengah kejuruan, D1, D2, dan D3 bidang terkait kominfo dengan tujuan agar mereka memiliki modal berupa pengakuan kompetensi untuk memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing di dunia kerja.</p>
Cara Menghitung	Membandingkan antara jumlah peserta dengan peserta kompeten (lulus sertifikasi)
Satuan	persentase
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Puslitprof SDM Komunikasi, Puslitprof SDM Informatika
Penanggung Jawab	Puslitprof SDM Komunikasi, Puslitprof SDM Informatika

Manual IKU 35	Jumlah rancangan regulasi SKKNI Bidang Kominfo
----------------------	--

Target 2017	4 dokumen
Definisi	<p>Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNI) merupakan acuan yang menjadi standar dalam hubungannya dengankemampuan kerja yang meliputi aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas serta sesuai dengan persyaratan pekerjaan.</p> <p>Sedangkan KKNi merupakan acuan dalam pengemasan SKKNI ke tingkat atau jenjang kualifikasi.</p> <p>Dengan disusunnya RSKKNI dan RKKNI, akan dapat digunakan sebagai acuan dalam pendidikan bidang TIK, sekaligus terintegrasi dengan kebutuhan dalam industri bidang TIK. Penetapan pemberlakuan SKKNI dan KKNi dilaksanakan oleh Kementerian teknis terkait.</p> <p>Pelaksanaan rancangan regulasi SKKNI ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop 1 (25%) 2. Workshop 2 (25%) 3. Pra Konvensi (25%) 4. Konvensi (25%)
Cara Menghitung	4 dokumen adalah: 2 RSKKNI bidang Informatika dan Komunikasi serta 2 RKKNI bidang Informatika dan Komunikasi
Satuan	dokumen
Klasifikasi	stabilize
Sumber Data	Puslitprof SDM Komunikasi, Puslitprof SDM Informatika
Penanggung Jawab	Puslitprof SDM Komunikasi, Puslitprof SDM Informatika

Manual IKU 35	Jumlah peserta literasi TIK untuk anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas
Target 2017	5400 *Perubahan Target Menjadi 5.300
Definisi	Kegiatan literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah merupakan pengenalan TIK tingkat dasar, kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan agar kalangan disabilitas, wanita dan anak usia sekolah memiliki pengetahuan TIK tingkat dasar dan mampu untuk mengoperasikan komputer untuk program-program dasar, memiliki kemampuan mengakses internet dan mencari informasi yang dibutuhkan sehingga diharapkan TIK akan membawa manfaat yang positif untuk menunjang kehidupan.
Cara Menghitung	Capaian sasaran peserta terliterasi TIK dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.
Satuan	orang
Klasifikasi	maximize
Sumber Data	Puslitprof SDM Informatika, BPPTIK, BPRTIK, BBPPKI dan BPPKI
Penanggung Jawab	Puslitprof SDM Informatika, BPPTIK, BPRTIK, BBPPKI dan BPPKI